

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia, tetapi hal ini belum menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹ Melihat hal tersebut, Indonesia membutuhkan adanya usaha dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Pembangunan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Pembangunan juga diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.³ Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan juga harus dipahami sebagai salah satu proses berdimensi jarak yaitu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, seluruh rakyat dan kelembagaan nasional serta percepatan pembangunan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan dan kemiskinan *absolute*.⁴

¹ Yesi Hendriani, "The Economic Growth and The Regional Characteristics : The Case of Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia, Vol.16 No.1 Juli 2013* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), hal. 5

² *Ibid*, hal.4

³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.1

⁴ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 29

Dari beberapa penelusuran, maka makna pembangunan dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan. Pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada penambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan.⁵

Keberhasilan sebuah pembangunan akan dapat dilihat dan diukur dari indikator-indikator tersebut, sehingga pembangunan memiliki kejelasan orientasi dan target yang dapat dinilai secara riil. Adapun dimensi pembangunan dapat dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan masyarakat secara umum. Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya bermuara pada kemiskinan.⁶

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan di negara-negara berkembang antara lain:⁷

- a. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, negara - negara Afrika, dan sebagainya bukan saja

⁵ Muhammad Hasan, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Jakarta: CV Nur Lina, 2018), hal. 4

⁶ *Ibid*, hal.5

⁷ *Ibid*, hal.6

merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

- b. Perhatian terhadap masalah pembangunan negara - negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapat dukungan politik, seperti perhatian yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁸ Selain itu, konstitusi juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

⁸ Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Bandung: Alumni, 2010), hal. 74

⁹ *Ibid.*

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya menyatakan bahwa tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi juga ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, konsep pembangunan ekonomi Indonesia lebih menitik beratkan kepada asas manfaat, yakni sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.¹⁰

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.¹¹ Selain itu, Subandi juga mengatakan pengertian dari pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.¹²

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 76

¹¹ Iwan Nugroho & Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 84

¹² Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan* (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal.1

komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Akan tetapi, yang lebih penting adalah menentukan sasaran pembangunan, karena kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan banyak mempengaruhi kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹³ Kehidupan yang lebih baik menurut Goulhet meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri dan kebutuhan kebebasan.¹⁴ Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti harus ada menurut Todaro sebagai berikut :¹⁵

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap

¹³ Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.6

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Buku Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 1280

budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan, kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi sangat diperlukan dalam usaha mengejar kemakmuran dan ketertinggalan dengan negara-negara lain. Bagaimanapun juga pembangunan akan memberikan harapan-harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tingkat kebutuhan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sangat tinggi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu cara dalam mengatasi hal ini adalah dengan melakukan investasi. Investasi sendiri dapat dilakukan di lembaga perbankan. Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya menjaga kestabilan moneter yang di sebabkan atas kebijakannya terhadap simpanan masyarakat serta sebagai lalu lintas pembayaran.

Fungsi utama perbankan dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, dengan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut pada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Dengan ini, dapat dikatakan sebagai jantung bagi perkembangan perekonomian dalam peningkatan standar taraf hidup. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁶

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat terlihat peranan perbankan yang diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dua hal tersebut merupakan tugas inti dari sebuah Bank Umum.¹⁷

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya seluruh kegiatan perbankan berkaitan dengan keuangan. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan *funding*. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari

¹⁶ Thomas Suyatno, Azhar Abdullah, dan Johan Thomas Aponno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 1

¹⁷ “Peran Perbankan BI”, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/>, diakses tanggal 19 September 2018

dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang strategi agar masyarakat bersedia menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.¹⁸ Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini dapat menyediakan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah.

Dari pengertian tersebut, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Menghimpun dana atau *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan misalnya simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*);
2. Menyalurkan dana atau *lending* kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak

¹⁸ H. Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan kesatu (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal.15

¹⁹ *Ibid.*

permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet;

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*) maupun luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *traveller cheque* dan jasa lainnya.

Bank memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam wilayah suatu negara. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.²⁰ Kemudian, bank umum dapat dikatakan sebagai bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007. Sedangkan bank perkreditan rakyat berbeda dengan bank umum, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

²⁰ *Ibid*, hal.31

²¹ “Bank Perkreditan Rakyat”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses pada tanggal 21 September 2018

Sejak tahun 1992 Indonesia memperkenalkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992 berdirilah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan undang-undang perbankan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru maupun bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah muncul pertama kali di Mesir yang hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi islam.²²

Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utama adalah bagaimana memperoleh keuntungan, pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada

²² Ahmad el-Najjar, *Ban Bila Fawaid Ka Istiratijayyah lil tanmiyah al-iqtishadiyyah penerjemah Muhammad Bisri* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972), hal.35

bank syariah melarang adanya bunga tetapi dengan menggunakan prinsip bagi hasil.²³ Dalam bank syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan cara jual beli, prinsip bagi hasil dan investasi. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.²⁴ Tujuan penyaluran dana oleh bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁵

Pengembangan bank syariah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani di jasa bank konvensional karena masalah keyakinan, terutama yang berkaitan dengan sistem bunga. Selain itu, bank syariah merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional.²⁶ Pengembangan ini bertujuan menerapkan perbankan etik, yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi juga bekerja sama dengan nasabahnya untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi secara bersama-sama.²⁷

²³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani,2001), hal. 34

²⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (UII Press Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 7

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1

²⁶ Amie, Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.59

²⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal.5

Mengingat kebutuhan ekonomi masyarakat yang meningkat, peranan bank dalam sistem ekonomi pun sangat penting. Dengan adanya dunia perbankan, mempermudah masyarakat untuk menyimpan dan melakukan transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu, bank syariah pun hadir untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dengan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Kehadiran bank syariah diharapkan mendatangkan keuntungan yang lebih untuk masyarakat dibanding dengan bank konvensional.

Penelitian yang sejenis dengan topik yang penulis dalam pernah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Nama : Intan Khusnul Khotimala Putri
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perbankan Syariah terhadap Kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia) di Indonesia pada tahun 2010-2012
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2014
2. Nama : Dody Adi Wijaya
Judul Skripsi : Analisis Peran Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, tahun 2017

Dua peneliti terdahulu menyeroti tentang pengaruh perbankan syariah di Indonesia yang diproksikan dengan pertumbuhan pembiayaan berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan pengaruh pembiayaan pada perbankan syariah terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan yang akan diulas oleh penulis adalah pengaturan mengenai kegiatan bank syariah di Indonesia serta titik taut bank syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peran bank syariah dilingkup pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Atas Peran dan Fungsi Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas mengenai peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai kegiatan bank syariah di Indonesia?

2. Bagaimana titik taut bank syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia ditinjau dari segi hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Peran dan Fungsi Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan dan penerapan bank syariah di Indonesia
- b. Untuk memahami dan menganalisis titik taut bank syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bahan pustaka pemikiran untuk pengembangan serta penelitian ilmu hukum dan perbankan yang berkaitan dengan kegiatan bank syariah teoritis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan bahan bagi praktisi hukum yang berkecimpung dalam kegiatan bank syariah dan ekonomi di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini digunakan untuk mempermudah membahas topik dari permasalahan utama dari skripsi ini yang berjudul, “PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA” , maka dalam hal ini memuat beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas tentang pendahuluan dalam penelitian. Hal tersebut meliputi latar belakang tentang pembangunan ekonomi dan bank syariah. Lalu, penulis menuliskan rumusan masalah dari penelitian ini. Kemudian, penulis juga menjelaskan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Dalam kerangka teoritis akan dijelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul dan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, kerangka konseptual berisi tentang pengertian yang terkait dengan bank syariah dan pembangunan ekonomi.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Hal tersebut menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini.

4. BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan pembahasan dan analisis atau jawaban dari rumusan masalah yang telah tertera pada bab satu.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh penulis serta saran yang diharapkan penulis terhadap pembaca skripsi ini.

